



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN CAMAT BY ONLINE

NAMA : Dra. LUSJE A. TABALUJAN, M.Pd
N I P : 19670121 198502 2 001
KELAS : B
N D H : 18

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II
TAHUN 2019**

EXECUTIVE SUMMARY

UJI KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI CAMAT BY ONLINE

Oleh : Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd.

Mentor : Drs. Dindin Wahidin, M.Si.

Coach : Drs. H. Edang Mochamad Kendana, M.Si.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, mengartikan bahwa Standar Kompetensi Pemerintahan adalah rumusan kemampuan dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelola pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah secara profesional, termasuk didalamnya Camat.

Sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Camat adalah proses pemberian sertifikat kompetensi pemerintahan kepada Camat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi pemerintahan sesuai Permendagri 108 Tahun 2017. Sertifikasi kompetensi bagi camat dilakukan melalui uji kompetensi pemerintahan. Data yang ada, jumlah Camat se Indonesia sebanyak 7.094. Jumlah ini adalah target untuk disertifikasi.

Inovasi yang dikembangkan memulaui proyek perubahan pada Diklat Kepeimpinan Tingkat II di BPSDM Kemendagri, adalah bagaimana mensertifikasi Camat dengan jumlah yang banyak, tersebar di seluruh Indonesia dengan biaya yang murah, mudah dijangkau dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Proyek perubahan yang dianggap tepat adalah dengan melaksanakan uji kompetensi pemerintahan bagi camat melalui online. Semoga dengan telah dilaksanakannya uji kompetensi pemerintahan bagi camat by online pertama kali sebagai bentuk penerapan proyek perubahan, akan dapat ditindaklanjuti dan dikembangkan untuk uji kompetensi pemerintahan bagi jabatan lain sesuai dengan jenjang jabatan yang berlaku.

Inovasi yang baru akan melahirkan inovasi-inovasi yang diharapkan akan mempercepat pembangunan dengan lebih mudah, murah, berdaya jangkauan yang luas dengan waktu yang cepat.

Semoga Allah SWT akan memberikan hikmat kepada setiap insan di bumi Indonesia khususnya Aparatur Sipil Negaranya dalam melahirkan inovasi-inovasi baru untuk kemaslahatan masyarakat.

Jakarta, 20 Juni 2019